

**OPOSISI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
MENURUT HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**SARI RAHMAWATI  
01370785**

**PEMBIMBING :**

- 1. DRS. KAMSI, MA.**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag. M.Ag.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2006**

## ABSTRAK

Dalam pemilu Legislatif 2004, PKS memperoleh suara yang cukup signifikan dibandingkan dengan perolehannya pada pemilu 1999 yang hanya sebesar 1,36% suara yaitu 8,3 juta suara dengan prosentase sebesar 7,34% suara. Namun hasil ini tidak membuat PKS mencalonkan presiden dari kadernya karena tidak memenuhi syarat minimal 20% seperti yang diputuskan pada Majelis Musyawarah Syura (MMS) III. Bahkan pada salah satu keputusan MMS IV PKS menegaskan bahwa akan menjalankan amanah konstituennya dengan ber"konsetrasi di legislatif" yang kemudian oleh sebagian kalangan dianggap sebagai oposisi.

Keputusan PKS untuk "berkonsentrasi di legislatif" tersebut merupakan tradisi baru dalam perpolitikan di Indonesia. Karena dalam sistem perpolitikan di Indonesia selama ini oposisi hampir sama sekali tidak pernah dilakukan oleh lembaga partai di parlemen, sehingga menurut penyusun menarik untuk dikaji sikap oposisi seperti apa yang dijalankan oleh PKS pada pemilu 2004.

Berdasarkan masalah di atas maka yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana sikap oposisi PKS dan pandangan hukum Islam terhadap sikap oposisi PKS tersebut.

Karena penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode observasi, interview, dan didukung dengan *library research* yaitu mencari dokumen PKS baik berupa buku, makalah atau artikel maupun media lainnya sebagai sumber data primer dan buku-buku terkait sebagai sumber data sekunder. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interpretatif, penyusun memperoleh jawaban bahwa berangkat dari semboyan yang dikumandangkan oleh PKS yaitu bersih dan peduli maka PKS peduli terhadap perkembangan yang terjadi dalam tubuh umat dan bangsa Indonesia dengan mengembangkan sikap oposisi di parlemen. Karena oposisi merupakan wujud dari pengamalan *amr ma'ruf nahī munkar*.

Setelah dilakukan analisa maka kesimpulannya adalah sikap politik yang diambil PKS adalah oposisi politis. Dimana PKS tidak menjadi partai oposisi akan tetapi mengambil langkah-langkah oposisi di parlemen untuk mengontrol kinerja pemerintah dalam bingkai *ta'awanū 'alā al-birri wa at-taqwa wa la ta'awanū 'alā al'ismi wa al-'udwān*.

**Drs. H. Kamsi, MA**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudari Sari Rahmawati

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sari Rahmawati

N.I.M. : 01370785

Judul : "Oposisi Partai Keadilan Sejahtera menurut Hukum Islam"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

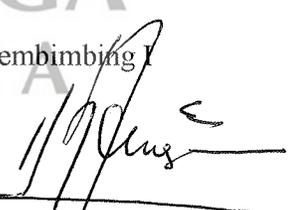
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Rabi'ul Awwal 1427 H  
10 Mei 2006 M

Pembimbing I

  
**Drs. H. Kamsi, M.A**  
NIP. 150 231 514

**Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudari Sari Rahmawati

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sari Rahmawati

N.I.M. : 01370785

Judul : "Oposisi Partai Keadilan Sejahtera menurut Hukum Islam"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Rabi'ul Awwal 1427 H  
10 Mei 2006 M

Pembimbing II

**Yasin Baidi, S.Ag M.Ag**  
NIP. 150 286 404

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**OPOSISI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**Yang disusun oleh:**

**SARI RAHMAWATI**

**NIM: 01370785**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2006 M / 26 Rabi'ul Awwal 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Rabi'ul Awwal 1427 H  
24 Mei 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

  
Drs. H. Kamsi, MA  
NIP: 150 231 514

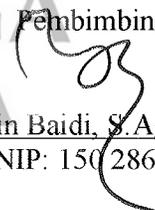
Sekretaris Sidang

  
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si  
NIP: 150 256 649

Pembimbing I

  
Drs. H. Kamsi, MA  
NIP: 150 231 514

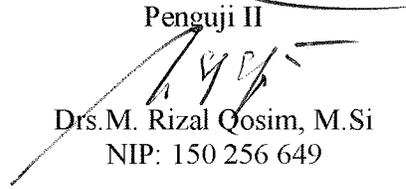
Pembimbing II

  
Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.  
NIP: 150 286 404

Penguji I

  
Drs. H. Kamsi, MA  
NIP: 150 231 514

Penguji II

  
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si  
NIP: 150 256 649

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1987 Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تتسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>ḥurūḍ</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

*Ora Et Labora*

(berdo'a dan bekerja)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Semua ini ku persembahkan kepada orang tuaku tersayang yang tak hentinya mendo'akan tuk keberhasilanku.*

*Kepada keluargaku tercinta yang selalu memberikan dukungannya dalam setiap langkahku.*

*Teman-teman yang selalu menghiasi setiap jejak langkah kehidupanku.*

*The last, kepada yang terkasih thanks telah memberikan hadiah terindah dalam hidupku.*



*I Love U ALL*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أم بعد

Puji syukur senantiasa penyusun haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam penyusunan skripsi ini. Şalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga serta para sahabat, yang memberikan *syafa'at* kepada umatnya. Amin.

Penyusun berharap, sekecil apapun semoga tulisan ini akan memberikan inspirasi dan sumbangan dalam pengembangan studi hukum Islam khususnya dalam kajian *Fiqh Siyāsah* (Hukum Politik Islam).

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari bantuan serta do'a dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai. Dalam kesempatan ini, penyusun ucapkan terima kasih serta do'a semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Kamsi, MA, dan Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah sabar dan bijaksana mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan skripsi.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa.
4. Ibu Nur'ainy AM, S.H, M.H (Alm), selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Segenap Dosen Syari'ah khususnya dosen Jurusan Jinayah Siyasa serta Karyawan Fakultas Syari'ah.

6. Bapak M. Ilyas selaku sekretaris DPW Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta yang banyak memberikan masukan dan informasi mengenai PKS.
7. Abah Nasril dan Mama Sadar tersayang serta seluruh keluarga besar H. Sahide, yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil serta do'a yang tiada henti kepada penyusun.
8. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun penyusun telah berusaha dengan segenap kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, namun penyusun sangat menyadari keterbatasan dan kurang sempurna dalam skripsi ini. Oleh sebab itu, penyusun sangat mengharapkan saran serta kritik dari segenap sahabat yang membaca tulisan ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan hamba Nya yang berbuat baik dan memanfaatkan kesalahan hamba Nya yang berbuat khilaf. Amin.

Yogyakarta, 21 Rabi'ul Awwal 1427 H  
19 April 2006 M



Sari Rahmawati  
NIM. 01370785

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OPOSISI</b>	
A. Pengertian Oposisi.....	18
B. Sejarah Oposisi dalam Kancah Politik Indonesia.....	21
C. Oposisi menurut Hukum Islam.....	25

**BAB III PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DAN SIKAP  
POLITIKNYA PADA PEMILU 2004**

A. Sejarah Lahirnya PKS .....	30
B. Visi dan Misi PKS .....	36
C. Prinsip Kebijakan PKS.....	38
D. Asas-asas dan Tujuan PKS.....	44
E. Fenomena PKS dalam Belantika Politik Proses Reformasi .....	45
F. Sikap Politik PKS Pada Pemilu 2004.....	49

**BAB IV OPOSISI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) MENURUT  
HUKUM ISLAM**

A. Oposisi PKS.....	58
B. Oposisi PKS menurut Hukum Islam.....	72

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80

**DAFTAR PUSTAKA.....** 82

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Daftar Terjemahan
2. Biografi Ulama dan sarjana
3. Curriculum Vitae



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tahun 2004 merupakan tahun yang terbaru dari empat tahun besar tahun pemilihan umum (pemilu), yang merupakan *turning point* dalam sejarah bangsa Indonesia setelah merdeka disamping *turning point* lain yang bukan pemilu seperti tahun 1945 (Proklamasi Kemerdekaan), tahun 1949 (Penyerahan Kedaulatan), tahun 1965 (Malapetaka G 30 S PKI) dan tahun 1998 (*Lengser Keprabon*).<sup>1</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana yang tak terpisahkan dari kehidupan politik negara demokratis modern sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU No. 12 tahun 2003, tentang Pemilihan Umum, yakni sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>2</sup>

Pemilu 2004 memiliki makna penting bagi kelanjutan demokrasi dan transisi politik karena merupakan pemilu kedua yang diselenggarakan pada era reformasi dengan sistem multipartai. Jika kembali ke sejarah bangsa Indonesia setelah revolusi kemerdekaan tahun 1945-1949, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat No.X pada November 1945,

---

<sup>1</sup>Lance Castles, *Pemilu 2004: Dalam Konteks Komparatif dan Historis*, cet. ke-I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.2.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1).

sehingga Indonesia memasuki sistem multipartai hingga pemilu pertama di Indonesia September 1955.<sup>3</sup> Tetapi pada pemilu 2004 ini terjadi pengurangan jumlah partai politik di karenakan pemberlakuan *Electoral Treshold*<sup>4</sup> dengan minimal mendapat 2 % suara.

Pada pemilu 2004 inipun terjadi perubahan mekanisme pelaksanaannya jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Sebelumnya calon-calon yang dipilih melalui lembaga perwakilan, akan tetapi pada pemilu 2004, calon-calonnya dipilih langsung oleh rakyat melalui 3 proses tahap pemilihan.<sup>5</sup> Pertama, pemilihan legislatif. kedua, pemilihan presiden (pilpres) putaran pertama dan ketiga pilpres putaran kedua<sup>6</sup>

Pemilu legislatif tanggal 5 April 2004 berjalan sesuai jadwal dan setelah proses penghitungan suara berakhir versi Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai-partai yang sebelumnya masuk 5 besar pada pemilu 1999 mengalami perubahan yang cukup signifikan, salah satunya partai Islam Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS yang merupakan metamorfosis dari Partai Keadilan (PK) telah berhasil mengantongi suara 7,34% yang pada pemilu 1999 hanya mendapatkan 1,36% suara. Meskipun PKS telah berhasil mengantongi suara

<sup>3</sup>Eep Saefullah Fatah, "Prolog" untuk Saefullah Fatah, *Membangun Oposisi: Agenda-agenda Perubahan Politik Masa Depan*, (Bandung Remaja Rosdakarya 1999), hlm.xiv

<sup>4</sup>*Electoral Treshold* yaitu batas minimal perolehan suara sebuah partai pada pemilu sebelumnya sebagai syarat untuk mengikuti pemilu berikutnya.

<sup>5</sup>Komisi Pemilihan Umum, *Panduan Pemilih: Apa dan Bagaimana Pemilu 2004*, (Jakarta: KPU, 2004), hlm. 17-18.

<sup>6</sup>Proses pemilu 2004 ada 3 tahapan,yaitu: *Pertama*, pemilihan DPR, DPRD, DPD. *Kedua*, pilpres putaran pertama dengan syarat calon presiden dan wakil presiden tersebut memperoleh suara lebih dari 50% secara nasional, dengan perolehan suara minimal 20% tersebar di lebih dari 16 provinsi. *Ketiga*, pilpres putaran kedua hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak pada putaran pertama.

yang cukup pada pemilu 2004, jauh dari target semula dengan perkiraan 10-20% suara namun sesuai hasil keputusan Musyawarah Majelis Syuro IV pada tanggal 24 April 2004, PKS memutuskan untuk menjadi *partai oposisi*.<sup>7</sup> Sebuah keputusan yang dianggap berani dan tidak disangka-sangka sebelumnya.

Ada yang menilai bahwa sikap oposisi yang diputuskan oleh PKS tersebut mengkhianati konstituennya yang mengharapkan agar PKS dapat terlibat dalam bursa pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 5 Juli 2004. Namun jika melihat dari visi PKS yang memposisikan dirinya sebagai partai dakwah dengan semangat dakwah *amr ma'rūf nahī munkar*, maka oposisi PKS dapat dilihat dalam pemerintahan, seperti yang diungkapkan oleh sekjen PKS Anis Matta yang menjelaskan sebaiknya kader PKS tidak ada yang masuk dalam kabinet mendatang.<sup>8</sup> Begitu juga dengan penjelasan singkat Hidayat Nur Wahid mengartikan oposisi sebagai tugas amar ma'ruf nahi munkar yang bersifat konstruktif<sup>9</sup>

Menurut pengamat politik Eep Saefullah Fatah, oposisi di parlemen memang tak terlalu populer, hal ini disebabkan suasana politik Indonesia tak mendukung. Sejarah mencatat, kehidupan politik ketika awal-awal kemerdekaan, tidak ada tendensi peniadaan oposisi. Juga tak ada penindasan

<sup>7</sup>Gazalba Saleh, "Sikap Oposisi PKS dan Pandangan Islam", <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0504/14/0802.htm>.

<sup>8</sup>*Kompas*, 11 Agustus 2004. Salah satu keputusan Musyawarah Majelis Syura (MMS) IV adalah bahwa PKS akan mengambil sikap politik "berkonsentrasi di parlemen" yang kemudian oleh media diistilahkan sebagai oposisi. Lihat *Serial Maklumat*, edisi 06 Tahun II/1425 H.

<sup>9</sup>*Saksi*, No.21, Th.VI (18 Agustus 2004), hlm.7.

terhadap kaum oposan sebagai pengganjal bagi penguasa. Ketika itu, berbagai kekuatan politik siap menjadi pemenang tetapi juga sekaligus pecundang yang baik. Toleransi lintas kelompok, ideologi dan kepentingan merupakan perangkat kultural yang dibangun demokrasi liberal. Sistem inilah yang membuat Pemilu 1955 berlangsung bersih, elegan. Namun sejak periode selanjutnya hingga berakhirnya kekuasaan Orde Baru oposisi menjadi kering bahkan dibinasakan<sup>10</sup>

Pasca keruntuhan Soeharto, oposisi politik mulai mendapatkan *recognition* dari pemerintahan resmi. Pertama kalinya diproklamirkan oleh Kelompok Enam (KE) sebagai oposisi pemerintah dengan nama Forum Komunikasi Kelompok Penyeimbang (FKKP) yang beranggotakan Emil Salim, Nurkholis Madjid (Cak Nur), Amin Rais, Rudini, Adnan Buyung Nasution dan Sudjana Safi'i dalam pertemuannya dengan presiden Habibie pada tanggal 23 Mei 1998. selain FKKP beberapa kelompok lain yang muncul setelah reformasi bergulir juga menamakan dirinya sebagai kekuatan oposisi atas pemerintah.<sup>11</sup>

Harus diakui, pilihan beroposisi PKS adalah tradisi baru bagi perpolitikan di Indonesia. Selama ini, peran oposisi secara signifikan hanya dimainkan oleh lembaga non partai politik di luar parlemen. Sedangkan partai politik lebih suka berada dalam lingkaran kekuasaan. Hampir semua kekuatan

---

<sup>10</sup>Eep Saefullah Fatah, *Membangun Oposisi*, hlm. xiv-xx. Lihat juga Lance Castles, *Pemilu 2004*, hlm.4.

<sup>11</sup>Sidharta Gautama dan Aries Budiyono, *Moralitas Politik dan Pemerintahan yang Bersih Menurut Empat Tokoh Reformasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.101-102.

politik yang meraih suara dalam pemilu lalu memiliki wakil dalam pemerintahan. Maka tak mengherankan, kerap muncul praktik *politik dagang sapi*. Akibat lainnya, kontrol terhadap pemerintahan oleh legislatif sangat lemah. Tentunya, sikap yang dipilih PKS yang memperoleh kursi legislatif cukup banyak bisa menjadi kekuatan berarti untuk mengontrol lajunya pemerintahan.

Persoalannya adalah dalam realitas politik kita, implementasi wacana oposisi perlu adanya reposisi dan reaktualisasi yang terkait dengan kelembagaan. Sebab, terjadi semacam ambiguitas makna legislatif yang harusnya semua anggota dewan legislatif bersikap oposisi terhadap eksekutif karena itu sudah menjadi fungsinya, tidak perlu dikotomi, yang duduk di parlemen dari unsur dan partai manapun entah yang berkuasa ataupun tidak berkuasa. Idealnya adalah partai yang berkuasa cukup menjadi MPR di samping duduk di eksekutif pemerintahan, bila tidak mau menjadi oposisi di legislatif. Sehingga, DPR adalah sebagai perwujudan institusional struktural bagi barisan oposisi eksekutif yang berfungsi mengontrol, mengawasi dan meluruskan kebijakan pemerintah.<sup>12</sup>

Dalam wacana politik Islam, oposisi bukan sekedar hak melainkan juga kewajiban.<sup>13</sup> Oposisi merupakan kegiatan yang menyerukan kepada kebenaran dan melawan kemungkar (*amr ma'ruf nahi munkar*).

---

<sup>12</sup>Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. XXIV, (Jakarta, Gramedia, 2003), hlm.184.

<sup>13</sup>Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani: Isu-isu Besar Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 132.

Jika berangkat dari sejarah Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, mereka melakukan oposisi yang dijiwai semangat amar ma'ruf nahi munkar karena hal tersebut sebagai kontrol hukum dan pembatasan kekuasaan yang mana sesuai dengan prinsip dasar *sharing of power dan check and balance*.

Ketika Abu Bakar dibaiat sebagai Khalifah, sebagian sahabat menolak untuk memberikan baiat dan ikut dalam pemerintahannya serta memilih menjadi oposisi diantaranya adalah Saad bin Ubadah. Dan hal itu dilindungi oleh Abu Bakar. Demikian halnya Amirul Mukminin, Umar bin Khathab ketika telah diangkat menjadi khalifah menyerukan: "*Wahai rakyatku, siapapun yang melihat penyimpangan pada diriku, maka hendaklah ia meluruskannya.*"<sup>14</sup>

PKS telah menentukan sikap oposisinya. Namun belum jelas konsep oposisi yang akan dijalankannya. Apakah oposisi dalam arti berusaha selalu menentang setiap kebijakan pemerintah yang berkuasa atau oposisi yang berorientasi pada kemaslahatan umat dengan landasan Islam?

Namun, strategi menempatkan partai sebagai oposisi merupakan langkah jitu di era masyarakat yang apriori terhadap keberadaan berbagai macam partai yang hanya mementingkan kekuasaan belaka.<sup>15</sup> Ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi PKS dalam memberikan kontribusi positif bagi kepentingan rakyat banyak, khususnya rakyat kecil (*wong cilik*) yang selama ini termarginalkan oleh kekuasaan.

---

<sup>14</sup> Fahmi Huwaidi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani*, hlm.136.

<sup>15</sup> Eep Saefulloh Fatah, "Perlu Oposisi yang Konstruktif", *Saksi*, No.18, Th.VI (7 Juli 2004), hlm.13.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini.

1. Bagaimana sikap oposisi PKS?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sikap oposisi PKS tersebut?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan sikap oposisi PKS.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap sikap oposisi PKS.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan wawasan yang lebih luas dalam kajian oposisi.
- b. Menambah hazanah keilmuan Islam dalam perpolitikan Islam.

## D. Telaah Pustaka

Oposisi merupakan hal yang sudah lama hadir dalam perpolitikan dan banyak dibahas oleh para pemikir politik baik dari segi konsep maupun empiris. Beberapa karya tulis yang berkaitan dengan oposisi antara lain buku *Beroposisi menurut Islam*<sup>16</sup> karya Jabir Qumaihah yang pembahasannya menekankan pada sejarah dan praktek oposisi pada zaman awal Islam. Di

---

<sup>16</sup>Jabir Qumaihah, *Beroposisi menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

samping itu ada pula buku, *Islamo-Demokrasi Pemikiran Nurcholis Madjid*<sup>17</sup> yang ditulis oleh Anas Urbaningrum. Buku ini menempatkan oposisi sebagai bagian dari karakteristik demokrasi dan juga terkait dengan penjelasan Al-Qur'an bahwa oposisi merupakan semangat amar ma'ruf nahi mungkar.

Sementara pembahasan oposisi yang telah dibahas sebagai karya ilmiah. Penelitian yang pernah disusun jumpai di antaranya: *Oposisi Politik dalam Pandangan Hukum Islam*,<sup>18</sup> membahas dengan signifikan oposisi politik dalam hukum Islam serta hubungannya dengan pemerintahan. *Lalu Oposisi Politik dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Abu Ya'la al-Farra' dan Ibnu Taimiyah)*<sup>19</sup> yang mengkomparasikan pemikiran *Abu Ya'la al-Farra'* dan Ibnu Taimiyah mengenai oposisi. Pembahasan kedua tokoh tersebut terletak pada oposisi dalam bentuk partisipasi politik yang tidak menimbulkan mafsadah. Dan *Partai Oposisi Menurut Ibnu Khaldun*,<sup>20</sup> membahas pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun terkait dengan partai oposisi dalam Islam. Namun dari ketiga skripsi tersebut tidak membahas oposisi dalam pemilu terutama oposisi PKS pada pemilu 2004.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA

<sup>17</sup>Anas Urbaningrum, *Islamo-Demokrasi Pemikiran Nurcholis Madjid* (Jakarta: Republika, 2004).

<sup>18</sup>Wahyu Hidayat, *Oposisi Politik dalam Pandangan Islam*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

<sup>19</sup>Haris, *Oposisi Politik dalam Islam: Studi Atas Pemikiran Abu Ya'la al-Farra' dan Ibnu Taimiyah*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002)

<sup>20</sup>Beni Susanto, *Partai Oposisi menurut Ibnu Khaldun* Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000)

Sementara itu, beberapa skripsi yang membahas tentang PKS antara lain: *PK dalam Perspektif Politik Islam (Studi atas AD/ART PK)*,<sup>21</sup> yang pembahasannya terkait dengan partai yang memposisikan aspek moral dalam setiap langkah dan kebijakan yang di ambil serta menekankan orientasi gerakannya pada dakwah islamiyyah. Lalu *Politik Islam dan Demokratisasi di Yogyakarta (Studi Terhadap Partai Keadilan Sejahtera DPW DIY)*,<sup>22</sup> PKS menempatkan partainya sebagai sarana untuk menjalankan dakwahnya dalam proses demokarasi. Kemudian, *Islam dan Politik Menurut Partai Keadilan*,<sup>23</sup> yang pembahasannya PK tidak memisahkan Islam dan politik, karena politik dimaknai sebagai bagian dari dakwah yang bertujuan mengubah masyarakat menjadi islami. Lalu *Gerakan Dakwah Islam di Indonesia (Studi Tentang Gerakan Dakwah dan Pola Komunikasi Politik PK)*,<sup>24</sup> dan *Komunikasi Politik Islam (studi Analisis Dakwah Politik PK DIY)*,<sup>25</sup> mengenai komunikasi politik PK kepada masyarakat dalam bentuk training-training. Dan *Aktivitas Dakwah*

---

<sup>21</sup>Mohammad Isa, *PK dalam Perspektif Politik Islam (Studi atas AD/ART PK)*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

<sup>22</sup>Nurlailah, *Politik Islam dan Demokratisasi di Yogyakarta (Studi Terhadap Partai Keadilan Sejahtera DPW DIY)*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

<sup>23</sup>Much Sulton, *Islam dan Politik Menurut Partai Keadilan*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

<sup>24</sup>Susilawati, *Gerakan Dakwah Islam di Indonesia (Studi Tentang Gerakan Dakwah dan Pola Komunikasi Politik PK)*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

<sup>25</sup>Yadi Kurnadi, *Komunikasi Politik Islam (studi Analisis Dakwah Politik PK DIY)*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

*Partai Keadilan Kab.Gunung Kidul Tahun 2002*,<sup>26</sup> yang pelaksanaan dakwahnya dilakukan dalam bentuk kegiatan.

Namun dari beberapa skripsi PKS tersebut tidak membahas sikap politik PKS secara jelas pada pemilu 2004, sehingga menurut penulis penelitian tentang oposisi PKS dalam pemilu 2004 dapat dijadikan objek penelitian untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam tentang oposisi PKS tersebut.

Berdasarkan telaah penyusun terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu maka terlihat bahwa skripsi yang dikaji belum pernah ada yang meneliti.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Partai politik<sup>27</sup> merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik dengan sistem kepartaian<sup>28</sup> secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara legitimasi dan damai.<sup>29</sup>

<sup>26</sup>Rahman Saleh, *Aktivitas Dakwah Partai Keadilan Kab.Gunung Kidul Tahun 2002*. skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

<sup>27</sup>Partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.

<sup>28</sup>Arti politik, sistem kepartaian didefinisikan sebagai suatu prosedur yang diatur dalam organisasi (negara) yang dengannya seluruh atau sebagian anggota organisasi tersebut memilih sejumlah orang untuk menduduki jabatan dalam organisasi itu sendiri.

<sup>29</sup>Ichlasul Amal, Pengantar, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, cet. II, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996), hlm. xv.

Pemilu dalam sistem politik demokrasi akan melahirkan dua fungsi yang berbeda dari partai-partai yang bersaing. Pertama, partai pemenang yang memperoleh dukungan rakyat paling banyak akan menjadi memegang kendali pemerintahan. Sedangkan partai yang kedua, partai-partai yang kalah, memerankan diri sebagai pengawas dan penyeimbang (*check and balance*) bagi pemerintah yang selanjutnya berperan sebagai oposisi untuk menguji kebijaksanaan pemerintah dan mengajukan alternatif<sup>30</sup> agar pemerintahan berjalan sesuai dengan rel-rel yang disepakati (*konsensus*) bagi berbagai elemen politik.

Menurut Jabir Qumaihah, oposisi merupakan kegiatan untuk menyerukan kepada kebenaran dan kemunkaran (*amr ma'ruf nahi munkar*) yang merupakan fokus dasar perintah syari'ah yaitu atas kemaslahatan bersama<sup>31</sup> seperti firman Allah dalam Al-Qur'an

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر  
وأنتك هم المفلحون<sup>32</sup>

Di samping itu, Imam Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan<sup>33</sup> harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-

<sup>30</sup>Eep Saefullah Fatah, *Membangun Oposisi*, hlm.xii. Lihat juga B.N Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2003), hlm.455.

<sup>31</sup>Jabir Qumaihah, *Beroposisi menurut Islam*, hlm.50.

<sup>32</sup>Āli 'Imrān (3): 104.

<sup>33</sup>Secara etimologi *maslahah* berarti manfaat. Secara terminologi "mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'". Untuk lebih jelasnya lihat Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta, Logos Publishing House), hlm.114.

tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapat warisan yang menurut mereka hal itu mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara', karena itu hal tersebut tidak dinamakan *maṣlahah*.<sup>34</sup> Oleh sebab itu, menurut Imam Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

Dalam sejarah hukum Islam *maṣlahah* atau *istiṣlah* dikenal sebagai salah satu dari hasil ijtihad melalui *ar-Ra'yu* (akal) manusia.<sup>35</sup> Dilihat dari segi kandungan masalah, para ulama ushul fiqh membagi masalah menjadi 2 bagian yaitu<sup>36</sup>

- a. *al-Maṣlahah al-‘Āmmah* ( المصلحة العامة ), yaitu kemaslahatan yang menyangkut orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas ummat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
- b. *al-Maṣlahah al-Khāṣṣah* ( المصلحة الخاصة ), yaitu kemaslahatan pribadi dan itu sangat jarang sekali terjadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan

<sup>34</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, hlm.115.

<sup>35</sup>Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet.III, (Jakarta: Bulan Bintang 1984), hlm.74.

<sup>36</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, hlm.116.

dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

Dalam Islam apabila terjadi pertentangan antara masalah umum dengan masalah pribadi maka yang prioritas yang didahulukan adalah kemaslahatan untuk umum.

Menurut Imam Malik kepentingan atau kemaslahatan umum adalah salah satu dari sumber-sumber syari'ah, dengan syarat yaitu *pertama*, kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu bukanlah hal-hal yang berkenaan dengan ibadat. *Kedua*, kemaslahatan umum itu harus selaras (*in harmony with*) dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syari'ah itu sendiri dan *ketiga*, kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu yang esensial (diperlukan) dan bukanlah hal-hal yang bersifat kemewahan.<sup>37</sup> Hal-hal yang diperlukan itu merupakan upaya yang berkaitan dengan dengan lima tujuan hukum Islam – sebagaimana yang yang dirumuskan oleh Imam Syatibi yaitu untuk melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda<sup>38</sup>

Dalam Islam, oposisi erat kaitannya dengan suatu upaya untuk menegakkan tatanan masyarakat yang adil. Oposisi bukan sekedar hak melainkan merupakan kewajiban menurut syariat.<sup>39</sup> Sebagai sebuah hak maka

---

<sup>37</sup>M. Thahir Azharv. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana 2003), hlm.9.

<sup>38</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, hlm.114.

<sup>39</sup>Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, hlm.135.

oposisi merupakan sesuatu yang bersifat asasi bagi manusia dan oleh karena itu siapapun termasuk seorang pemimpin sekalipun tidak dibenarkan menghilangkan hak tersebut. Sedangkan sebagai kewajiban jika yang dilakukan pemerintah (pemimpin) telah keluar dari norma-norma agama, cenderung menghancurkan rakyat, atau berbuat kemungkaran dan kebatilan maka status oposisi telah naik pada tingkat wajib.

Menurut Cak Nur, yang terpenting dalam memahami mengenai oposisi adalah terciptanya kemaslahatan bersama (*al-Maṣlahah al-'Ammah*), dengan menciptakan suasana demokratis secara gradual, disisi lain perlu memanfaatkan kebebasan yang tersisa secara bertanggungjawab<sup>40</sup>

Oposisi yang lazimnya dipresentasikan oleh partai oposisi hanya salah satu alternatif dari tersedianya kekuatan politik kontrol publik secara efektif terhadap pemerintahan. Artinya jikapun tidak tumbuh partai yang secara tegas menyebut sebagai partai oposisi tetapi kontrol dilakukan secara memadai oleh kekuatan-kekuatan non pemerintah, maka demokrasi bisa berjalan. Dengan kata lain, oposisi merupakan konsekuensi logis dari sistem pemerintahan demokrasi.<sup>41</sup>

Dalam konteks diatas, hakikat oposisi terletak pada kejernihannya memandang segala sesuatu serta konsistensi sikap dalam meyakini kebenaran. Seperti dimaklumi, perspektif tentang kebenaran (dan kekeliruan) yang hidup di tengah masyarakat sangat beragam. Karena itulah, kebenaran dalam bahasa

---

<sup>40</sup>Sidharta Gautama dan Aries Budivono. *Moralitas Politik*. hlm.105.

<sup>41</sup>Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi*, hlm.165

politik dapat didefinisikan secara pragmatis sebagai kebijakan politik yang partisipatif dan menghasilkan keadilan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), karena data diperoleh dari tokoh-tokoh dan sumber-sumber yang berkaitan dengan partai PKS. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

### **2. Pengumpulan Data**

#### **a. Dokumentasi**

Mengumpulkan data primer yang berupa buku-buku, peraturan-peraturan, surat-surat keputusan yang merupakan dokumen PKS baik berupa buku, makalah, artikel maupun media lainnya. Di samping itu juga penyusun mengumpulkan data-data sekunder yang membahas oposisi maupun PKS.

#### **b. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh PKS, kader ataupun simpatisan yang terkait dengan PKS untuk mendapatkan fakta-fakta yang lebih valid.

c. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati baik secara langsung maupun tidak langsung fenomena-fenomena dilapangan yang berkaitan dengan PKS,

3. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan analisis deduktif dan interpretatif.

**G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mempermudah dalam memahami dan membahas permasalahan yang diteliti, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang diawali, Bab Pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah yang menjadi dasar dari perumusan pokok masalah dan tujuan dari penelitian ini. Kemudian telaah pustaka yang menunjukkan penelitian ini dibanding penelitian-penelitian yang lain. selanjutnya kerangka teoritik dan metode penelitian yang menjelaskan perangkat teori yang digunakan dan metode yang tepat dalam menentukan pendekatan masalah tersebut dan terakhir dikemukakan tentang bagaimana sistematika pembahasan.

Selanjutnya adalah Bab kedua, tentang gambaran umum oposisi dengan sub pembahasan pengertian oposisi, sejarah perkembangan oposisi politik di Indonesia dan kedudukan oposisi dalam hukum Islam. Dan dilanjutkan dalam Bab ketiga, tentang jati diri PKS yang didalamnya terdiri atas sejarah politik PKS, visi dan misi PKS, prinsip kebijakan POKS serta asas-asas dan tujuan PKS. Dan untuk memudahkan penyusun dalam penelitian maka penyusun

memberikan gambaran tentang fenomena PKS dan sikap politik PKS pada pemilu 2004 sebagai proses demokrasi.

Dan dalam Bab keempat membahas oposisi PKS dan kaitannya dengan hukum Islam (*fiqh siyāsah*). Kemudian diakhiri dengan Bab kelima, yang merupakan penutup berupa kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sikap politik yang diambil oleh PKS bukanlah menjadi partai oposisi melainkan menjalankan langkah-langkah oposisi melalui konsentrasi para kadernya di parlemen untuk mengontrol kinerja pemerintah. Jika kebijakan pemerintah itu benar maka akan didukung, tapi jika salah maka di kritisi.
2. PKS menjalankan fungsinya sebagai oposisi di parlemen tidak lepas dari visi partai sebagai partai da'wah penegak sistem Islam dalam bingkai persatuan umat dan bangsa. Dalam Islam, oposisi merupakan implementasi dari *amr ma'ruf nahī munkar* selama orientasi yang dibangun adalah untuk menjunjung kebenaran dan kemaslahatan bersama.

#### B. Saran-saran

1. Penulis berharap munculnya partai-partai lain yang mempunyai sikap politik seperti PKS dan siap menjadi oposisi pemerintah.
2. PKS harus selalu tetap konsisten dengan keputusan-keputusannya. Keikutsertaan PKS dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono merupakan ujian bagi PKS, apakah PKS akan tetap

memperjuangkan amanah-amanah rakyat yang selama ini menjadi motto PKS.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surabaya, Mekar Surabaya, 2000.

### B. Hadis

Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz I, cet.2, Bandung, Dahlan.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Al-Gazzali, Ihya' 'Ulum ad-Din, Penerj. M. Moh. Zuhri dkk, Semarang, Asy-Syifa', 1993.

Al-Qardhawi, Yusuf, Gerakan Islam Antara Perbedaan yang Dibolehkan dan Perpercahan yang Dilarang (Fiqhul Ikhtilaf), Jakarta, Rabbani Press, 1997.

-----, Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al-Qur'an dan As-Sunnah, Jakarta, Robbani Press, 2005.

Al-Wa'iy, Taufiq Yusuf, *Al-Fikr as-Siyāsi al-Muāṣir 'inda a-Ikhwān al-Muslimīn*, al-Maktabah al-Manar al-Islāmiyyah, 2000.

Azhary, M. Thohir, S.H., Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta, Kencana, 2003.

Hanafi, Ahmad, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1984.

Haroen, Nasrun, Ushul Fiqh I, Jakarta, Logos Publishing House, 1996.

Huwaydi, Fahmi, Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani: Isu-isu Besar Politik Islam, Bandung, Mizan, 1996.

Rahman, Fazlur, Tema Pokok Al-Qur'an, terj. Anas Muhyiddin, Bandung, Pustaka, 1995.

Rodi, Umaidi, Strategi PPP 1973-1982: Suatu Studi tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional, Jakarta, Integrita Press, 1984.

Qumaihah, Jabir, Beroposisi Menurut Islam, Jakarta, Gema Insani Press, 1995.

#### **D. Kelompok Buku Lain-lain**

Amal, Ichlasul, Teori-teori Mutakhir Partai Politik, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1996.

Budiharjo, Miriam, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta, Gramedia, cet.xxiv, 2003.

Castles, Lance, Pemilu 2004: Dalam Konteks Komparatif dan Historis, Cet. ke-I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.

Dadang Juliantara, Meretas Jalan Demokrasi, Yogyakarta, Kanisius, 1998.

Departemen P&K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1991.

Echols, M. John dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, cet. Xxv, 2003.

Gautama, Shidarta dan Aries Budiyo, Moralitas Politik dan Pemerintahan yang Bersih menurut Empat Tokoh Reformasi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999.

Kamarudin, Ada Apa Dengan PKS: Catatan dari Warga Universitas Indonesia, Jakarta, Pustaka Nauka, 2004.

Karim, M. Rusli, Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut, Jakarta, Citra Niaga Rajawali Press, 1993.

Komisi Pemilihan Umum, Panduan Pemilih: Apa dan Bagaimana Pemilu 2004, Jakarta, Komisi Pemilihan Umum, 2004.

Kompas, Partai-partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program 2004-2009, Jakarta, Buku Kompas, 2004.

Luth, Thohir, M. Natsir: Dakwah dan Pemikirannya, Jakarta, Gema Insani Press, 1999.

Machmudi, Yon, Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia, Bandung, Harakatuna Publishing, 2005.

-----, Menyelamatkan Bangsa: Platform Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera, DPP PK Sejahtera, Jakarta, Al-I'tishom, 2004.

- Marbun, B.N. SH, Kamus Politik, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Nur Wahid, DR. H.M. Hidayat, M.A, Mengelola Masa Transisi Menuju Masyarakat Madani, Jakarta, Fikri, 2004.
- Saefullah Fatah, Eep, Membangun Oposisi: Agenda-agenda Perubahan Politik Masa Depan, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1999.
- , Sekilas Partai Keadilan: Berjihad Membangun Indonesia yang Adil Sejahtera, Yogyakarta, DPW PKS, 2004.
- Salim, Hairus, Tujuh Mesin Pendulang Suara: Perkenalan Prediksi dan Harapan Pemilu 1999, Yogyakarta, LKiS, 1999.
- Sanit, Arbi, Reformasi Politik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.
- Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta, Grasindo, 1992.
- Waluyo, Sapto, Kebangkitan Politik Dakwah, Bandung, Harakatuna Publishing, 2005
- Warson Munawwir, Ahmad, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Surabaya, Pustaka Progresif, 1984.
- Zaenuddin, HM, Prospek Gerakan Oposisi dalam Era Pemerintahan Gus Dur-Megawati, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.
- Jawa Pos*, Selasa, 6 April 2004 dalam dokumentasi DPW PKS.
- Jawa Pos*, Rabu, 7 April 2004 dalam dokumentasi DPW PKS.
- Kompas*, 11 Agustus 2004 dalam dokumentasi DPW PKS.
- Republika*, Sabtu, 10 April 2004 dalam dokumentasi DPW PKS.
- Republika*, Senin, 26 April 2004 dalam dokumentasi DPW PKS.
- Saksi*, No.18 Th. VI, 7 Juli 2004.
- Saksi*, No.21 Th. VI, 18 Agustus 2004.
- DPW PKS DIY, Serial Taujihah Edisi 04, Tahun II/1425 H/2004 M.
- DPW PKS DIY, Serial Maklumat Edisi 06, Tahun II/1425 H/2004 M.
- DPW PKS DIY, Serial Maklumat Edisi 09, Tahun II/1425 H/2004 M.
- DPW PKS DIY, Serial Maklumat Edisi 16, Tahun II/1425 H/2004 M.
- <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0504/14/0802.htm>.
- <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0404/26/utama/989882.htm>.